



KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU (KISP)

Jalan Randu, RT 4/5 Mejing Wetan, Ambarketawang, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 555183
Hp. 089639400855 E-Mail: kis.pemilu@gmail.com

PERS RILIS KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU

DORONG TRANSPARANSI KPU DAN PERINGATAN POTENSI DELEGITIMASI PEMILU TERKAIT POLEMIK VIRAL-NYA ISU 'KPPS' DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta – Beberapa hari ke belakang, Media sosial diramaikan soal isu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Sleman, Bantul dan Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Topik yang dibicarakan adalah soal sajian konsumsi yang tidak layak saat pelantikan KPPS, dan ungkapan protes terkait honorarium KPPS saat pelantikan dan bimtek.

Snack yang disediakan berupa cemilan pastel, roti, dan air mineral kemasan gelas. Padahal dari informasi KPU Sleman, anggaran untuk penganan per orang yang diserahkan vendor Rp 15 ribu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman kemudian menyampaikan klarifikasi dan mengambil langkah tegas terkait isu snack yang dianggap tidak layak untuk pelantikan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) (Tempo.co).

Menurut Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi, snack yang disajikan oleh vendor hanya bernilai Rp2.500 per porsi dari anggaran sebesar Rp15.000 per calon anggota KPPS, mengakibatkan konsumsi tersebut dinilai tidak memadai.

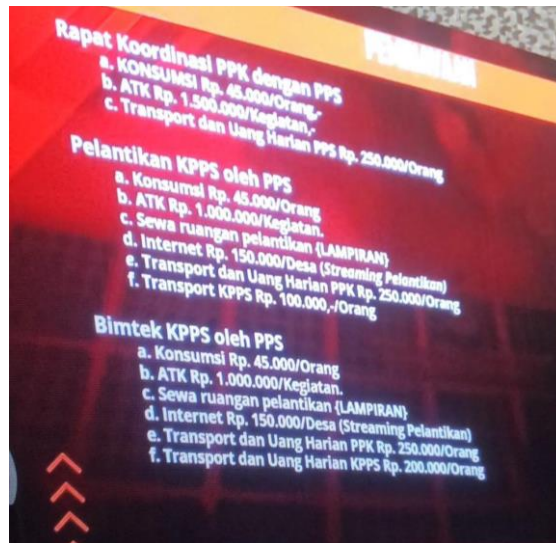
Buntut polemik tersebut, tersebar surat klarifikasi dari Shinta Catering Service selaku penyedia snack di media sosial. Mereka mengaku bahwa pihak mereka bukanlah vendor yang bermitra langsung dengan KPU Sleman. Menurut klarifikasinya, pihak yang memesan kepada mereka adalah PT. Jujur Kinaryo Projo. Jika ini benar, maka sangat disayangkan pola kerjasama yang berjalan menjadi tidak jelas.

Sementara itu di Kabupaten Bantul, polemik yang terjadi adalah keterlambatan kedatangan konsumsi saat pelantikan KPPS. Selain itu, juga viral di mana KPPS memprotes lauk pauk yang dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang dianggarkan untuk konsumsi.

Masalah lain yang juga viral adalah terkait KPPS juga terjadi di Kulon Progo. Dikutip dari pemberitaan Kompas.tv, permasalahan perihal KPPS juga terjadi di Kulon Progo. sejumlah anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) mendatangi kantor KPU Kulon Progo.

Sekretaris Daerah DIY, Beny Suharsono dalam [rilis resminya](#) turut mengomentari polemik terkait konsumsi saat pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Sleman. Menurut Beny, persoalan penyediaan makan dan minum yang tengah viral di media sosial karena dinilai tidak sesuai anggaran yang telah disediakan ini, harus diselesaikan dengan tuntas.

Selain itu, juga tersebar foto *slide* yang menampilkan rincian anggaran untuk kegiatan KPPS di media sosial.



Keterangan Gambar: Foto Slide berisi rincian anggaran kegiatan KPPS yang tersebar dan viral di Media Sosial

Walaupun foto di atas patut didalami terlebih dahulu ke-*valid*-annya, namun dengan masifnya tersebar foto tersebut sangat berpotensi menjadi pertanyaan besar di tengah publik terkait transparansi dan akuntabilitas anggaran pelaksanaan Pemilu.

Berdasarkan permasalahan di atas, Komite Independen Sadar Pemilu memberikan pandangan kritis sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran KPU Patut Dipertanyakan

KISP menilai permasalahan ini bukanlah permasalahan yang sederhana dan tidak bisa disepelekan. Kami menilai transparansi dan akuntabilitas merupakan nafas utama pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Sehingga, KISP menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam konteks Pemilu. Peristiwa ini bukan hanya menyangkut masalah konsumsi semata, melainkan dapat berpotensi merusak legitimasi Pemilu dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPU.

2. Potensi Delegitimasi Pemilu dan Meningkatnya Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap Jalannya Pemilu

Viralnya permasalahan ini – bahkan *trending* di X – juga membuat citra pelaksanaan Pemilu di DIY juga menjadi buruk, dan menggiring opini masyarakat secara masif sehingga berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap jalannya Pemilu. Masalah ini juga berpotensi mendelegitimasi jalannya proses dan hasil pemilu. Masyarakat dapat meragukan integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang seharusnya menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel.



KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU (KISP)

Jalan Randu, RT 4/5 Mejing Wetan, Ambarketawang, Gamping, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 555183
Hp. 089639400855 E-Mail: kis.pemilu@gmail.com

Berdasarkan pandangan tersebut, KISP bersikap sebagai berikut:

1. **Mendesak KPU untuk memberikan penjelasan secara bijak, transparan dan menyeluruh terkait penggunaan anggaran pelantikan dan Bimtek KPPS di Daerah Istimewa Yogyakarta.** KPU harus memberikan klarifikasi yang tuntas agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang jelas terkait permasalahan ini, sekaligus berkomitmen menyelesaikan masalah ini hingga tuntas.
2. **Mendesak KPU menjamin terpenuhinya hak-hak anggota KPPS sesuai ketentuan yang berlaku,** guna menjaga stabilitas proses pelaksanaan Pemilu 2024 agar tidak terganggu oleh polemik dan konflik yang ada.
3. **KISP memberikan peringatan terhadap potensi delegitimasi Pemilu yang dapat timbul akibat kontroversi ini.** Kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi harus dijaga, dan tindakan korektif segera diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.

Sebagai lembaga independen yang peduli terhadap integritas Pemilu, KISP akan terus memantau dan mengadvokasi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap penyelenggaraan Pemilu. Kami berharap agar kejadian serupa tidak terulang dan Pemilu dapat berjalan dengan adil, transparan, dan akuntabel.

Yogyakarta, 28 Januari 2024

Hormat Kami,

Muhammad Iqbal Khatami, S.I.Kom, MA. (Manager Pemantau Pemilu 2024 KISP)

Narahubung: 081227252121 (Iqbal)